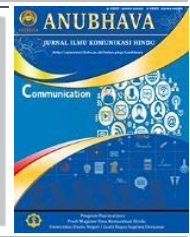




Contents list available at [Anubhava](http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/anubhava)

JURNAL ILMU KOMUNIKASI HINDU

Journal Homepage <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/anubhava>



IMPLEMENTASI KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI: STUDI KUALITATIF PADA INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG PASCA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

I Nyoman Windu Surya Sidantha ^{a,1}

I Nyoman Alit Putrawan ^b

I Made Arsa Wiguna ^c

^{a,b,c} Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

¹ Corresponding Author, email: windusuryasidanta2000@gmail.com (Windu)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 08-07-2024

Revised: 06-03-2025

Accepted: 25-03-2025

Published: 31-03-2025

Keywords:

Organizational

Communication;

Employee

Performance;

Election Commission;

ABSTRACT

Organizational communication is the process of exchanging information between members of an organization to achieve common goals and ensure effective operations. One of the organizations formed by the government to handle the election process is the General Election Commission (KPU). The objectives of this study are (1) Analyzing the implementation of organizational communication in improving employee performance in the Badung Regency KPU office after the 2020 Simultaneous Regional Elections; (2) Analyzing organizational communication obstacles in improving employee performance in the Badung Regency KPU agency after the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections; (3) To find out the implications of organizational communication in improving employee performance in the Badung Regency KPU agency after the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections. The data collection techniques used in this study are by using observation, interviews, documentation, and triangulation. qualitative descriptive methods analyze the results of the data. The results of this study are (1) the General Election Commission (KPU) of Badung Regency applies the concept of organizational communication and applies several concepts of organizational communication and performance concepts; (2) Communication obstacles faced, namely framework obstacles and technical obstacles; (3) Implications obtained by the Badung Regency General Election Commission, namely: (a) Implications for improving employee performance; (b) Implications of internal human resources. Theoretically, this research makes a significant contribution to the development of communication science, especially in the realm of organizational communication, by showing how effective communication implementation can encourage improvement in institutional performance after major political agendas such as the Regional Elections.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang mencakup pertukaran informasi, gagasan, perasaan, atau pesan antar individu atau kelompok (Sutrisno, 2020, 8). Salah satu tingkatan komunikasi, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan bersama serta memastikan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi (Denis McQuail dalam Cangara, 2020, 6).

Komunikasi organisasi merujuk pada proses pertukaran dan interpretasi pesan antara unit-unit komunikasi yang terintegrasi dalam suatu entitas organisasi. Organisasi tersebut terstruktur dalam hubungan hierarkis atau saling berhubungan, dan beroperasi dalam konteks lingkungan yang spesifik (Wayne R. Pace, 2020, 5). Organisasi bisa terbentuk dengan adanya sebuah komunikasi, dan tanpa komunikasi tidak mungkin adanya suatu sistem sosial atau organisasi (Amoadu *et al.*, 2023). Komunikasi yang jelas dan efektif merupakan proses integrasi unsur-unsur yang membentuk komponen-komponen sistem yang dinamis, di mana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dan beradaptasi untuk menumbuhkan bentuk kepercayaan yang lebih stabil (Jiao *et al.*, 2023).

Adapun bentuk-bentuk komunikasi organisasi menurut (Iriantara, 2021, 6) adalah komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

Salah satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani proses pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Secara hierarkis, Komisi Pemilihan Umum dibagi menjadi tiga, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota). KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan umum lainnya yang berada di wilayah administratif kabupaten atau kota.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Badung Provinsi Bali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Badung secara resmi diikuti oleh satu pasangan calon yaitu, I Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan Drs. I Ketut Suiasa dengan tiga partai pengusung yakni Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar dan

Partai Demokrat dengan dukungan total 37 kursi (28 kursi PDI-P, 7 kursi Partai Golkar, dan 2 kursi Partai Demokrat) dari 40 kursi di DPRD Kabupaten Badung.

Melalui pelaksanaan komunikasi organisasi dalam bentuk proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Badung memperoleh suatu keberhasilan dengan terpilihnya kembali pasangan calon I Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan Drs. I Ketut Suiasa dengan perolehan suara sebesar 94,6 persen serta angka partisipasi masyarakat yang tinggi sebesar 84,62 persen (Yulianto, 2021).

Keberhasilan komunikasi organisasi melalui proses sosialisasi oleh KPU Kabupaten Badung yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, belum menggambarkan secara signifikan peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan faktor krusial dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Efektivitas kinerja pegawai KPU Kabupaten Badung secara langsung memengaruhi berbagai aspek operasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proses Pilkada serentak tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada tahun berikutnya, selain proses sosialisasi kepada masyarakat, dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, perlu memperhatikan beberapa faktor yang telah teridentifikasi. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah Artikel milik (Widhiasthini, 2020) dalam jurnal yang berjudul "Dinamika Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi kasus di Kabupaten Badung, Provinsi Bali." jurnal ini menggunakan metode penelitian analisis netnografi secara online dan pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi melalui tulisan, data sekunder serta data pendukung lainnya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye calon tunggal dilakukan dengan beberapa penyesuaian seperti debat antar pasangan calon diubah menjadi pendalaman visi dan misi agar dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan KPU Badung cukup rumit, mereka sangat gencar melakukan sosialisasi agar partisipasi pemilih tetap tinggi. Kontribusi penelitian Widhiasthini kepada penelitian ini

berupa memberikan referensi tentang penyebab munculnya pasangan calon tunggal pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Badung serta metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Badung dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat Kabupaten Badung. Yang menjadi pembeda dari penelitian penulis adalah, penelitian Widhiasthini meneliti dinamika komunikasi calon tunggal sedangkan penulis meneliti tentang komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian relevan kedua yang dijadikan acuan adalah penelitian (Sustanino & Lestari, 2020) dalam jurnal yang berjudul "Komunikasi Internal Pada Perusahaan Bienti Mediaworks Dari Perspektif Teori Kendali Organisasi". Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi teori kendali organisasi yang dikembangkan oleh Philip Tompkins dan George Cheney dalam konteks komunikasi internal di Perusahaan Bienti Mediaworks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi teori kendali organisasi ini secara umum dinilai terbuka dan aktif dalam upaya mengelola komunikasi internal di Perusahaan Bienti Mediaworks. Kontribusi penelitian Sustanino kepada penelitian ini berupa memberikan referensi tentang teori kendali organisasi dalam menganalisis bentuk komunikasi organisasi. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sustanino dengan penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sustanino menitikberatkan pada analisis komunikasi internal di Perusahaan Bienti Mediaworks dari perspektif teori kendali organisasi. Di sisi lain, penelitian ini difokuskan pada eksplorasi komunikasi organisasi dalam konteks meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggali secara mendalam bagaimana komunikasi organisasi diinternalisasikan dan diterapkan di lingkungan kerja KPU Kabupaten Badung setelah Pilkada Serentak 2020, yang merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti komunikasi organisasi dalam situasi rutin atau dalam organisasi bisnis dan pendidikan,

penelitian ini menempatkan objek kajian pada institusi negara yang memiliki karakteristik kerja yang bersifat siklikal dan berbasis agenda politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan eksperimen, melainkan berfokus pada pengamatan terhadap fenomena yang berlangsung secara alamiah. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang terdiri atas berbagai bentuk seperti teks verbal, gambar, serta fenomena yang teramati. Penentuan informan dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta teknik triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas data.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik validasi data, antara lain *member check*, yakni dengan meminta konfirmasi dari informan mengenai keakuratan hasil wawancara; *peer debriefing*, yaitu diskusi dengan rekan sejawat untuk memperoleh masukan kritis terkait proses dan hasil penelitian; serta *audit trail*, dengan mendokumentasikan secara rinci seluruh proses penelitian agar dapat ditelusuri dan direplikasi.

Analisis data dilakukan secara induktif dan kualitatif, dengan penekanan pada pengungkapan makna yang mendalam dari data yang dikumpulkan, bukan pada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai bagaimana komunikasi organisasi berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Pasca Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Komunikasi organisasi secara makna denotatif dapat didefinisikan sebagai bentuk dan penafsiran pesan di antara unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi dalam hubungan hierarkis atau berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan serta komunikasi organisasi secara makna konotatif melibatkan tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pembentukan hubungan, pembangunan budaya, pemeliharaan identitas merek, dan berbagai aspek lain yang memengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi (Wayne R. Pace, 2020, 6). Komunikasi organisasi yang terjadi di instansi KPU Kabupaten Badung secara makna denotatif ditunjukkan melalui bentuk-bentuk komunikasi organisasi menurut (Iriantara, Yosol, 2021, 6) yaitu: komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dilakukan untuk kepentingan operasional dan pelaksanaan fungsi organisasi yang diperlihatkan pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dalam pola komunikasi internal di instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung. Perubahan signifikan dalam pola komunikasi internal di KPU Kabupaten Badung pasca Pilkada serentak tahun 2020 mencerminkan upaya pembenahan manajemen komunikasi sebagai respons terhadap dinamika kerja kelembagaan yang semakin kompleks. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Suprianti, 2018, 9) yang mengkaji pola komunikasi internal di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, di mana pasca Pilkada serentak, terjadi peningkatan koordinasi dan efektivitas komunikasi lintas bagian. Dalam studi tersebut, struktur komunikasi yang lebih sistematis turut mendorong efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kelembagaan.

Dalam konteks KPU Kabupaten Badung, pola komunikasi yang “terstruktur dan terorganisir” pasca Pilkada menunjukkan

adanya transformasi dari pola komunikasi informal yang sebelumnya mungkin bersifat top-down menuju komunikasi dua arah yang lebih inklusif. Transformasi ini dapat dikaitkan dengan pendekatan *communication for development*, di mana komunikasi tidak sekadar menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media pemberdayaan dan partisipasi aktif.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penggunaan istilah “komunikasi yang sehat dan konsentris” menandakan adanya hubungan komunikasi yang saling memperkuat antara seluruh elemen organisasi, dari pimpinan hingga staf pelaksana. Pola konsentris ini selaras dengan model komunikasi partisipatif yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker dalam (Hikmalia & Toni, 2023) di mana komunikasi yang terjadi bersifat dialogis dan menekankan pada proses timbal balik dalam pengambilan keputusan.

Komunikasi eksternal yang terbentuk dalam instansi KPU Kabupaten Badung pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 menunjukkan adanya upaya yang terstruktur untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Pola komunikasi terkoordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung melalui penyelenggaraan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) menjadi salah satu bentuk strategi komunikasi partisipatif. Strategi ini tidak hanya digunakan untuk menyosialisasikan regulasi atau aturan pasca Pilkada, tetapi juga untuk membangun ruang dialog antara penyelenggara dan pemangku kepentingan.

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Xie et al., 2020) dalam jurnal *Jurnal Ilmu Komunikasi*, yang meneliti komunikasi eksternal KPU Provinsi Jawa Tengah dalam konteks pemilu. Studi tersebut menyebutkan bahwa kegiatan komunikasi publik seperti diskusi terbuka, pelatihan partisipatif, dan penyuluhan regulasi mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi proses demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam komunikasi eksternal, seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung, merupakan strategi yang efektif dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat

sekaligus membangun hubungan yang lebih inklusif antara institusi dan warga.

Lebih lanjut, studi oleh (Ohemeng et al., 2020) dalam *Journal of Public Affairs* menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik dalam konteks pemerintahan sangat bergantung pada dua aspek utama: keterbukaan informasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks KPU Badung, keterbukaan diwujudkan melalui forum-forum publik seperti FGD, sementara keterlibatan aktif masyarakat tercermin dari partisipasi pemangku kepentingan dalam menyampaikan

masukan dan saran terhadap kebijakan Pilkada.

Berdasarkan dokumentasi *Focus Group Discussion* (FGD) di bawah ini, KPU Kabupaten Badung membuka ruang bagi berbagai pihak seperti Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), tokoh masyarakat, kalangan partai politik dan akademisi untuk berdiskusi secara mendalam mengenai isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada serentak. partisipasi dalam FGD ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, serta pertanyaan terkait regulasi dan pelaksanaan Pilkada.

Gambar 1. Dokumentasi Seminar KPU Kabupaten Badung



Sumber: <https://www.instagram.com/kpubadungkab?lgsh=mzrlodbinwflza==>
diunduh pada tanggal 2 April 2024

Gambar 2. Dokumentasi *Focus Group Discussion* (FGD) KPU Kabupaten Badung



Sumber: <https://www.instagram.com/kpubadungkab?lgsh=mzrlodbinwflza==>
diunduh pada tanggal 2 April 2024

KPU Kabupaten Badung sudah melakukan bentuk komunikasi secara internal dan eksternal. Bagian komunikasi internal dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pimpinan dan pegawai dalam mengambil suatu kebijakan, sedangkan komunikasi eksternal dilakukan melalui seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjelaskan kepada publik tentang regulasi atau aturan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang diikuti oleh satu pasangan calon saja, sehingga hal tersebut dapat menambah wawasan publik dan dapat menjadi contoh bagi KPU Kabupaten lainnya di Bali dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon.

Komunikasi organisasi yang terjadi di instansi KPU Kabupaten Badung secara makna konotatif, dijelaskan melalui salah satu model komunikasi menurut (Stewart L. Tubbs, 2021, 7), yaitu Model komunikasi linier atau model

komunikasi satu arah (*one way view of communication*) merupakan suatu paradigma dimana komunikator memberikan suatu stimulus, dan komunikan memberikan respons atau tanggapan yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi yang diterapkan dalam kegiatan pengarahan atau disebut sebagai apel pagi yang diwajibkan bagi seluruh jajaran pimpinan dan pegawai, dimulai pada pukul tujuh lebih tiga puluh menit. Selama pelaksanaan apel pagi, pimpinan KPU Kabupaten Badung menyampaikan informasi terkini kepada para pegawai. Informasi yang disampaikan mencakup kebijakan baru yang akan diterapkan dan rencana kerja yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu minggu ke depan. Pesan yang disampaikan oleh pimpinan diharapkan akan direspon secara tepat oleh para pegawai sesuai dengan kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan.

Penerapan model komunikasi linier ini, menjadi suatu penekanan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pimpinan dipahami dan direspons dengan benar oleh para pegawai melalui pelaksanaan komunikasi yang efektif sehingga menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kinerja pegawai. Melalui komunikasi yang efektif, informasi dapat mengalir dengan lancar di antara berbagai tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi.

Motivasi pegawai terbentuk dari sikap mereka dalam menghadapi situasi kerja (Mangkunegara, 2021, 7). Kinerja pegawai yang terjadi di KPU Kabupaten Badung menunjukkan kriteria yang sesuai dengan kriteria yang telah diungkapkan oleh Bernadin, di antaranya:

- a) Kualitas tingkat adalah hasil aktivitas yang mendekati sempurna dengan menyesuaikan cara-cara ideal dari penampilan aktivitas atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Badung dengan melakukan komunikasi terstruktur dalam mengelola anggaran yang telah disediakan, kemudian anggaran tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang diselesaikan tanpa melewati batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 tidak hanya sukses dalam pelaksanaannya saja, namun juga sukses dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan administrasi. Kualitas tingkat juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan ketika sebuah aktivitas mencapai kualitas tingkat, hal itu mencerminkan bahwa semua aspek dari aktivitas tersebut telah dipertimbangkan dan dikelola dengan baik serta pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, kualitas tingkat mencakup tidak hanya aspek teknis, tetapi juga aspek administratif sehingga integritas proses tersebut tetap terjaga.
- b) Kuantitas jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan, diperlihatkan Pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Badung menyelenggarakan rapat pleno terbuka untuk menyelesaikan proses pemilihan, termasuk menghitung suara setiap kandidat dalam rapat tersebut menggunakan mekanisme teknis penghitungan suara yang menjadi aspek penting untuk menentukan kandidat dengan perolehan suara terbanyak. Selain itu, rapat pleno juga menangani administrasi terkait pemilihan, yang menjadi dasar penyusunan laporan resmi hasil Pilkada.

- c) Ketepatan Waktu Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain, diterapkan ketika proses pelipatan surat suara pada pilkada serentak tahun 2020 yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target yang ditentukan selama tiga hari dengan melibatkan 72 orang petugas yang dilakukan di gudang KPU Kabupaten Badung serta setiap pelipatan surat suara juga selalu diawasi oleh tim pengawas dari KPU Kabupaten Badung. Melalui keberhasilan dalam pelipatan surat suara pada Pilkada Serentak tahun 2020, KPU Kabupaten Badung menunjukkan dedikasinya dalam menjaga ketepatan waktu serta kualitas dalam setiap langkah yang diambil. Keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi KPU Kabupaten lainnya di Bali dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas yang membutuhkan koordinasi waktu yang baik, terutama dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.
- d) Efektivitas tingkat penggunaan sumber daya organisasi dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung telah memilih untuk memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alat utama dalam memfasilitasi komunikasi dengan pihak eksternal. Media yang dipilih untuk berinteraksi adalah *instagram*, *facebook*, situs web resmi, dan *youtube*. Keempat media ini dipilih karena kemampuannya dalam menyajikan informasi kepada khalayak dalam format yang beragam, termasuk foto dan video.

Pemanfaatan media sosial ini menjadi sangat penting bagi KPU Kabupaten Badung dalam

Gambar 3. Tangkapan Layar Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Badung



(Sumber: <https://www.instagram.com/kpubadungkab?igsh=mzrlodbinwflza==> diunduh pada tanggal 2 April 2024)

Salah satu strategi yang diadopsi oleh KPU Kabupaten Badung dalam memanfaatkan media sosial adalah dengan menciptakan konten-konten yang relevan dengan tren yang sedang berlangsung. Hal ini termasuk pembuatan video pendek yang mengikuti tren musik dan teknik editing terkini yang sedang populer di kalangan masyarakat. Dengan demikian, KPU dapat memperluas jangkauan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui media sosial, serta meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat terhadap informasi yang disajikan. Konten-konten yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Badung melalui media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembentukan opini publik yang lebih baik. Melalui video, gambar, dan teks yang disebar, masyarakat dapat lebih memahami peran dan fungsi KPU dalam proses demokrasi, memahami pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, serta memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya terkait proses pemilihan dan pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Badung, serta dengan kehadiran KPU Kabupaten Badung di media sosial juga membuka ruang bagi dialog dan interaksi dua arah antara lembaga dan masyarakat. Dengan adanya fitur komentar dan pesan langsung, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan, memberikan

rangka meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat.

Gambar 4. Tangkapan Layar Proses Pelipatan Surat Suara di KPU Kabupaten Badung



(Sumber: <https://www.instagram.com/kpubadungkab?igsh=mzrlodbinwflza==> diunduh pada tanggal 2 April 2024)

masukan, atau mengungkapkan pendapat mereka terkait berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU.

- e) Kemandirian Tingkat, sebagai suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan seorang pegawai untuk menjalankan tugasnya tanpa perlu meminta bantuan atau bimbingan dari pengawas, atau bahkan tanpa campur tangan pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan di instansi KPU Kabupaten Badung, merupakan prinsip yang sangat penting. Prinsip ini, ketika diterapkan secara individu, memaknai bahwa baik pimpinan maupun pegawai di KPU Kabupaten Badung harus bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Bali dan KPU Republik Indonesia. Kemandirian tingkat ini menunjukkan bahwa seorang pegawai di KPU Kabupaten Badung harus memiliki kepercayaan diri dan kompetensi yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya tanpa bergantung pada bimbingan atau campur tangan dari pengawas. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap individu dalam organisasi tersebut bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri, dengan mematuhi aturan yang berlaku. Pentingnya prinsip kemandirian tingkat ini tergambar dari upaya untuk mencegah terjadinya hasil yang merugikan di instansi KPU Kabupaten Badung.

- f) Komitmen kerja yang menggambarkan loyalitas dan tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan ditunjukkan KPU Kabupaten Badung, komitmen tersebut tercermin melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh para pegawai. Salah satu contohnya adalah keaktifan dalam merespon dan melaksanakan informasi yang disampaikan oleh pimpinan melalui media aplikasi *WhatsApp group*. Pegawai KPU Kabupaten Badung menunjukkan komitmen mereka dengan mengikuti setiap arahan dan petunjuk yang disampaikan melalui *group WhatsApp*. Mereka tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga berusaha untuk segera bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Keaktifan dalam merespon pesan dan melaksanakan tugas yang diberikan melalui *WhatsApp group* menunjukkan bahwa para pegawai memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap tugas dan fungsi yang mereka emban di dalam instansi.

Proses teori kendali organisasi yang terjadi di instansi KPU Kabupaten Badung, di antaranya sebagai berikut.

- a) Kendali kontrol sederhana adalah strategi yang menekankan penggunaan kekuasaan langsung dan terbuka oleh pemimpin dalam berinteraksi dengan anggota organisasi. Melalui pendekatan ini, pemimpin dapat lebih aktif terlibat dalam mengarahkan jalannya organisasi serta memastikan bahwa tujuan dan visi organisasi tercapai dengan efektif yang dilakukan melalui sesi diskusi santai pada jam istirahat. Pada kesempatan ini, pimpinan dan pegawai berbincang-bincang secara informal mengenai program kerja yang sedang dikerjakan. Hasil dari diskusi tersebut seringkali menghasilkan ide-ide baru yang berhasil menyelesaikan permasalahan pekerjaan dalam skala kecil dan mengurangi kebutuhan akan diskusi formal.
- b) Kendali kontrol teknis melibatkan penggunaan alat dan teknologi informasi dan komunikasi yang harus dimiliki oleh pimpinan dan pegawai KPU Kabupaten Badung untuk memudahkan komunikasi antara pimpinan dan pegawai di berbagai lokasi. Salah satu cara untuk menerapkan kendali kontrol teknis adalah dengan

membentuk beberapa kelompok atau *group* komunikasi. Kelompok ini dapat dibagi berdasarkan fungsinya, seperti grup untuk pimpinan, grup untuk seluruh jajaran KPU Badung, serta grup antar divisi. Dengan cara ini, komunikasi menjadi lebih terstruktur dan efektif, memungkinkan pimpinan dan pegawai untuk berinteraksi secara langsung dengan rekan kerjanya yang terkait dengan tugas-tugas mereka.

- c) Kendali kontrol birokrasi adalah aspek penting dalam pengelolaan organisasi yang melibatkan penerapan prosedur dan aturan formal oleh para pemimpin. Penerapan prosedur dan aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Salah satu penerapan kendali kontrol birokrasi di KPU Kabupaten Badung adalah melalui kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat pleno harian yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan pegawai.
- d) Kendali kontrol konsertif merupakan suatu proses yang melibatkan beragam aspek, mulai dari hubungan interpersonal, kerjasama tim, hingga pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai serta visi-misi organisasi. Proses ini sangat penting dalam menjaga kestabilan dan efektivitas kerja sebuah instansi. Bentuk kendali kontrol konsertif yang terjadi di instansi KPU Kabupaten Badung adalah melalui acara makan bersama. Acara ini rutin diselenggarakan setelah pelaksanaan pilkada maupun pemilu dengan tujuan utama memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antara pimpinan dan pegawai.

Hambatan Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

a) Hambatan Teknis

Menurut (Cangara, 2021, 7), menyatakan bahwa hambatan teknis terjadi jika salah satu yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Hambatan teknis terjadi di instansi KPU Kabupaten Badung karena adanya pengaruh kondisi lingkungan teknis yang

mengakibatkan ketidak lancarn pengiriman dan penerimaan pesan. Hambatan tersebut mencakup aspek teknologi seperti terbatasnya fasilitas komunikasi berupa *smartphone* pegawai yang sering mengalami gangguan sinyal atau kehabisan kuota internet. Kelemahan dalam infrastruktur teknis seperti jaringan internet yang lambat juga merupakan faktor penyebab hambatan teknis di KPU Kabupaten Badung. Jaringan yang lambat membuat proses komunikasi menjadi tidak efisien dan memperlambat alur kerja di instansi KPU Kabupaten Badung. Perangkat komunikasi yang sudah tua dan kurang dapat diandalkan juga menjadi salah satu hambatan teknis di KPU Kabupaten Badung. Selain itu, faktor lingkungan seperti cuaca ekstrem juga dapat menyebabkan gangguan pada perangkat komunikasi.

b) Hambatan semantik

Alasan tidak adanya hambatan semantik di KPU Badung, yaitu sudah terlaksananya kegiatan pelatihan pegawai. KPU Badung biasanya memberikan pelatihan kepada pegawainya untuk memastikan bahwa mereka memahami dengan jelas istilah-istilah yang digunakan dalam konteks pemilihan umum.

Pengalaman dan pembelajaran: dengan adanya pengalaman dari penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, KPU Kabupaten Badung dapat memperbaiki proses komunikasi dan mengidentifikasi serta mengatasi potensi hambatan semantik yang mungkin timbul.

c) Hambatan Psikologis

Alasan tidak adanya hambatan psikologis di KPU Kabupaten Badung, karena KPU Kabupaten Badung telah membangun kultur organisasi yang mendorong komunikasi terbuka, kolaborasi, dan keterlibatan aktif sehingga dalam lingkungan yang mendukung seperti ini, hambatan psikologis seperti ketakutan akan konflik, keengganan untuk mengambil risiko, atau resistensi terhadap perubahan dapat diminimalisir.

d) Hambatan Fisik

Alasan tidak adanya hambatan fisik di KPU Kabupaten Badung, yaitu sudah adanya penggunaan teknologi pemetaan meliputi Pemetaan digital dan teknologi geospasial memungkinkan KPU untuk memahami dengan baik wilayah pemilihan, distribusi pemilih, dan

pemetaan lokasi-lokasi penting seperti tempat pemungutan suara. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan kegiatan pemilihan dengan efisien, mengurangi dampak hambatan geografis.

e) Hambatan Status

Alasan tidak adanya hambatan status di KPU Kabupaten Badung, yaitu Budaya Organisasi yang Inklusif: KPU Kabupaten Badung mungkin telah mengembangkan budaya organisasi yang inklusif di mana semua anggota dihargai dan diakui berdasarkan kontribusi mereka, bukan berdasarkan status sosial atau senioritas. Ini menciptakan lingkungan di mana kolaborasi dan kerja tim didorong, bukan kompetisi berdasarkan hierarki sosial.

f) Hambatan Kerangka Berpikir

Menurut (Cangara, 2020, 6), hambatan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi yang disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda. Hambatan ini dirasakan oleh KPU Kabupaten Badung dengan perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman tersebut menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman dan ekspektasi. Ketidakselarasan dalam kerangka berpikir, sering menjadi sebab dari kesalahpahaman dan ketidakcocokan dalam interpretasi pesan yang disampaikan. Hambatan kerangka berpikir juga dapat muncul akibat perbedaan dalam terminologi dan konvensi yang digunakan dalam berkomunikasi.

g) Hambatan Budaya

Alasan tidak adanya hambatan budaya di KPU Kabupaten Badung, yaitu sudah terciptanya pola komunikasi yang terbuka dan kolaboratif. Budaya komunikasi yang terbuka dan kolaboratif mungkin telah menjadi norma di KPU Kabupaten Badung. Ketika ada perbedaan budaya, staf dan pimpinan mungkin terbiasa untuk membahasnya secara terbuka dan mencari solusi yang sesuai, tanpa meninggalkan kepentingan bersama.

Implikasi Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Pasca Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Pembahasan implikasi komunikasi organisasi ini, peneliti menggunakan teori S-O-R (*Stimulus Organism-Response*) untuk dapat menjelaskan hubungan antara stimulus, respons, dan kondisi internal individu.

a) Implikasi Meningkatkan Kinerja Pegawai

Menurut Khairunnisa dalam (Rahma Putri *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa Komunikasi antara seluruh aktor yang ada dalam organisasi, baik yang dijalankan secara vertikal maupun horizontal memiliki esensi untuk menyelesaikan persoalan sehingga masing-masing anggota memperoleh keuntungan. Komunikasi yang dibangun secara optimal, memicu terjadinya interaksi yang tergolong harmonis antar pegawai. Keharmonisan yang dibangun juga berimplikasi pada lingkup kerja yang stabil sehingga terdapat akomodasi terhadap apa saja yang dibutuhkan. Dengan demikian, keberhasilan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kelancaran komunikasi di semua tingkatan hierarki. Keseluruhan kelompok organisasi serta perusahaan pastinya senantiasa mendambakan kinerja yang meningkat secara periodik.

Adapun implikasi meningkatkan kinerja pegawai yang dirasakan oleh KPU Kabupaten Badung akan dijabarkan, sebagai berikut.

- (1) Implikasi kualitas tingkat hasil aktivitas yang mendekati sempurna dengan menyesuaikan cara-cara ideal dari penampilan aktivitas atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas yang dirasakan oleh KPU Kabupaten Badung dalam hal pengelolaan anggaran dan pelaporan administratif yang menunjukkan bahwa upaya KPU Kabupaten Badung bukan hanya untuk mencapai kesuksesan dalam hal pelaksanaan, tetapi juga dalam aspek ketepatan waktu dan administrasi serta kualitas tingkat juga menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam semua langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Badung.
- (2) Implikasi kuantitas jumlah yang dirasakan KPU Kabupaten Badung pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 adalah

pentingnya proses penghitungan suara yang teliti dan berjenjang untuk menentukan kandidat dengan perolehan suara terbanyak. Proses ini dimulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan oleh petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan akhirnya hasilnya disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung. Penghitungan suara yang teliti dan berjenjang ini menjadi aspek penting dalam menjaga integritas dan keabsahan hasil Pilkada sehingga dengan adanya mekanisme teknis penghitungan suara yang terstandarisasi, dapat dipastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Badung merupakan wujud dari komitmen untuk menjalankan proses demokrasi dengan baik.

- (3) Ketepatan waktu ini diterapkan secara efektif ketika proses pelipatan surat suara pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Badung berhasil diselesaikan sesuai target yang ditentukan dalam waktu tiga hari. Pelaksanaan proses pelipatan surat suara yang tepat waktu pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Badung melibatkan 72 orang petugas yang bekerja secara sistematis di gudang KPU Kabupaten Badung. Setiap langkah dalam pelipatan surat suara selalu diawasi secara ketat oleh tim pengawas yang berasal dari KPU Kabupaten Badung. Keberhasilan yang dicapai dalam pelipatan surat suara pada Pilkada Serentak tahun 2020 menunjukkan dedikasi serta komitmen KPU Kabupaten Badung dalam menjaga ketepatan waktu dan kualitas dalam setiap tahapan proses.
- (4) Implikasi dari efektivitas tingkat penggunaan sumber daya organisasi untuk meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya yang dirasakan oleh KPU Kabupaten Badung dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat utama dalam memfasilitasi komunikasi dengan pihak eksternal adalah bahwa pemanfaatan media sosial memiliki dampak yang signifikan

terhadap transparansi, aksesibilitas informasi, partisipasi masyarakat, citra lembaga, pendidikan politik, dan keamanan data. Dalam konteks penerapan implikasi ini oleh KPU Kabupaten Badung, langkah-langkah yang diambil dalam memanfaatkan media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, situs *web* resmi, dan *YouTube*, menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan akan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan media sosial ini, membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan memberikan akses yang lebih besar kepada informasi terkait pemilihan umum dan tugas-tugas KPU.

- (5) Kemandirian tingkat, sebagai suatu ukuran kemampuan pegawai untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pengawas, merupakan prinsip penting di KPU Kabupaten Badung. Hal ini menandakan bahwa baik pimpinan maupun pegawai di KPU Kabupaten Badung harus patuh pada aturan KPU Provinsi Bali dan KPU Republik Indonesia. Kemandirian tingkat menuntut kepercayaan diri dan kompetensi agar pegawai bisa bekerja tanpa bimbingan. Setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri. Prinsip kemandirian tingkat mencegah hasil merugikan di KPU Kabupaten Badung dengan menghindari kesalahan pegawai. Ini juga menunjukkan keteraturan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Setiap pegawai harus mampu mengatur dirinya sendiri tanpa terus-menerus dimonitor oleh pengawas. Kemandirian tingkat membutuhkan pemahaman dan patuh pada hierarki serta aturan yang telah ditetapkan.
- (6) Implikasi dari komitmen kerja yang menggambarkan loyalitas dan tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Badung, adalah adanya keterlibatan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi. Pegawai KPU Kabupaten Badung menunjukkan komitmen mereka dengan mengikuti setiap arahan dan petunjuk yang disampaikan melalui *group WhatsApp*, bukan hanya menerima informasi, tetapi juga bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan.

b) Implikasi Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia di dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung adalah penunjang utama kemajuan dalam pemilihan umum. Faktor sumber daya manusia ini mencakup seluruh karyawan dan staf yang bekerja di KPU Kabupaten Badung, termasuk pegawai operasional, manajemen, dan administrasi. Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 menunjukkan peningkatan etos kerja dan semangat kerja maksimal di antara karyawan dan staf KPU Badung. Dengan meningkatnya etos kerja dan semangat untuk bekerja secara maksimal, tahapan-tahapan pemilihan umum dan pemilihan legislatif tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sukses. Hal ini menandakan bahwa kontribusi faktor manusia dalam KPU Badung berdampak positif pada kelancaran proses pemilihan umum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, implementasi komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung dapat disimpulkan, sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam mengkaji implementasi komunikasi organisasi dalam lingkup lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung, dengan pendekatan dualistik makna komunikasi, yaitu secara denotatif dan konotatif. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti bagaimana komunikasi internal dan eksternal yang terstruktur pasca-Pilkada serentak tahun 2020 membentuk pola komunikasi konsertif dan koordinatif, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi komunikasi organisasi pada lembaga publik. Kebaruan lain terletak pada identifikasi model komunikasi satu arah (*one-way communication*) sebagai bentuk komunikasi konotatif yang diwujudkan melalui kegiatan apel pagi, serta integrasinya dengan sistem kendali organisasi meliputi kontrol sederhana, teknis, birokratis, dan konsertif.
- 2) Selain itu, penelitian ini mengungkap hambatan-hambatan komunikasi yang spesifik dihadapi oleh KPU Kabupaten Badung, yakni hambatan kerangka berpikir

akibat perbedaan latar belakang individu dan hambatan teknis terkait kondisi lingkungan kerja, yang berdampak terhadap efektivitas penyampaian pesan.

- 3) Implikasi dari penerapan komunikasi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai juga menjadi temuan penting yang berkontribusi terhadap kebaruan studi ini, karena mengaitkan indikator kinerja pegawai menurut Bernardin dengan pengaruh komunikasi organisasi secara langsung terhadap kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas sumber daya, kemandirian, dan komitmen kerja. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan teori komunikasi organisasi melalui pendekatan empiris yang kontekstual pada lembaga publik, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi komunikasi kelembagaan dalam meningkatkan performa sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2020). *Calon Tunggal di Pilkada Badung*. Kompas.Id.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2020/11/23/calon-tunggal-di-pilkada-badung>
- Amoadu, M., Ansah, E. W., & Sarfo, J. O. (2023). Influence of psychosocial safety climate on occupational health and safety: a scoping review. *BMC Public Health*, 23(1), 1344.
<https://doi.org/10.1186/s12889-023-16246-x>
- Cangara, H. (2020). *Perencanaan & Strategi komunikasi*: 6. PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, H. (2021). *Perencanaan & Strategi Komunikasi* : 7. PT Raja Grafindo Persada.
- Iriantara, Yosol, U. S. (2021). *komunikasi Pendidikan* : 6. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Jiao, L., Wachinger, J., Dasch, S., Bärnighausen, T., McMahon, S. A., & Chen, S. (2023). Calculation, knowledge, and identity: Dimensions of trust when making COVID-19 vaccination choices in China. *SSM - Qualitative Research in Health*, 4(June).
<https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2023.100288>
- Mangkunegara. (2021). *Evaluasi Kinerja SDM* : 7. PT Refika Aditama.
- Rahma Putri, S., Harahap, N., & Abidin, S. (2023). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(5), 1537–1544.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.838>
- Stewart L. Tubbs, S. M. (2021). *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi* : 7. PT Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia* : 8. Kencana Prenada Media Group.
- Wayne R. Pace, D. F. F. (2020). *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan* : 6. PT Remaja Rosdakarya.
- Widhiasthini, W. (2020). *Dinamika Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Badung, Provinsi Bali)*. 31.
- Hikmalia, W., & Toni, A. (2023). Menciptakan Iklim Harmonisasi Komunikasi Organisasi Untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai Administrasi. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 98–107.
<https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.4465>
- Ohemeng, F. L. K., Obuobisa Darko, T., & Amoako-Asiedu, E. (2020). Employee engagement and task performance in state-owned enterprises in developing countries: The case study of the power sector in Ghana. *Journal of Public Affairs*, 20(2).
<https://doi.org/10.1002/pa.2021>
- Rahma Putri, S., Harahap, N., & Abidin, S. (2023). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(5), 1537–1544.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.838>
- Xie, X., Zang, Z., & Ponzoo, J. M. (2020). The information impact of network media, the psychological reaction to the COVID-19 pandemic, and online knowledge acquisition: Evidence from Chinese college students. *Journal of Innovation and Knowledge*, 5(4), 297–305.
<https://doi.org/10.1016/j.jik.2020.10.005>
- Yulianto, A. (2021). *KPU Badung Tetapkan Paslon*

Terpilih *Giri* *Prasta-Suaisa.*
<https://news.republika.co.id/berita/qnfsm>

n396/kpu-badung-tetapkan-paslon-
terpilih-giri-prastasuaia